

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1357/pid B/2014/PN.MKS)**

OLEH

ADY NUR AKBAR ALI

B 111 11 113

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1357/pid B/2014/PN.MKS)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
Pada bagian hukum pidana program studi ilmu hukum

disusun dan diajukan oleh

ADY NUR AKBAR ALI

B 111 11 113

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 1357/pid/B/2014/PN.MKS)

Disusun dan diajukan oleh

ADY NUR AKBAR ALI

B111 11 113

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Jumat Tanggal 25 Februari 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M Said Karim, S.H. M.H. MSi

NIP. 19620711 198703 1 001

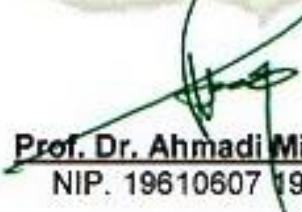
Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 198007102006041001

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ady Nur Akbar Ali

Nomor Induk : B 111 11 113

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan
No.1357/Pid.B/2 014/PN.Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 10 Agustus 2015

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.M.Si
NIP. 196207111987031001

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ADY NUR AKBAR ALI**
No. Pokok : B111 11 113
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian
Dengan pemberatan (Studi Kasus Putusan
No.1357/Pid.B/2 014/PN.Mks.)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2015

a.n. Dekan
Wakil Dekan I


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Ady Nur Akbar Ali (B111 11 113), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan (Study Kasus Nomor : 1357/Ppid.b/2014/PN.Mks). (Dibimbing oleh H.M Said Karim, selaku pembimbing I dan Amir Ilyas, selaku pembimbing II)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penerapan Hukum Pidana dalam putusan nomor : 1357/Pid.B/2014/PN.Mks yang menyatakan bahwa terdakwa Opi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan korban pemilik circle yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- tentang pencurian berat sudah tepat, hal itu sudah sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dengan keterangan terdakwa dan barang bukti. 2) Majelis hakim pengadilan negeri Makassar dalam pertimbangannya masih terdapat kekurangan terutama dalam hal pertimbangan subjektifnya, yaitu hal-hal yang memberatkan terdakwa, seharusnya hakim juga mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan dan masyarakat

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad, SAW. sebagai panutan seluruh muslim dimuka bumi ini.

Penulis banyak menyadari berbagai kesukaran dan kesulitan serta hambatan yang penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat kesadaran jiwa, ketekunan, keuletan, dan doa maka kesulitan dan hambatan yang dialami dapat penulis atasi sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud apa adanya.

Secara terkhusus skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda **ALIMUDDIN** dan Ibunda tersayang **ALMARHUM DAHLIA S.pd** sebagai ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala kasih sayang, doa yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, telah membesarkan serta mendidik dan membiayai penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada perguruan tinggi demi keberhasilan penulis. Begitu pula kepada **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** dan **dr. Yuyun Widangsih, S.PK** atas perhatian dan didikannya terhadap penulis selama kuliah sehingga bisa menyelesaikan studi dengan baik. Begitu pula saudari-saudariku yang tercinta, Perkenankan pula pada kesempatan ini penulis menghanturkan hormat dan terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi** selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas dan para pembantu dekan.
3. Bapak **Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.si** yang juga selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak **Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H.,M.H.**, Ibu **Hj. Haeranah, S.H., M.H.** dan Ibu **Nur Azizah S.H.,M.H** selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
5. **Seluruh dosen, seluruh staf bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Orang tua penulis **Alimuddin & Dahlia S.pd** yang selalu memberi dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sebagai sarjana hukum.
7. **Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf dan para karyawan dan karyawati** yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Gel. 87 2014.
9. Teman-teman **DOKTRIN 2011** yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari penyajian maupun dari penggunaan bahasa. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan

skripsi ini. Akhir kata harapan penulis ke depan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama kepada penulis sendiri, serta dapat berguna baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun dalam ilmu hukum pada khususnya.

Makassar, 10 Agustus 2015

Penulis,

ADY NUR AKBARA ALI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN MEJA	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Tindak Pidana Pencurian	14
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	15
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	20
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	25
1. Pengertian Terhadap “Dengan Pemberatan”	25
2. Unsur-unsur Dalam Keadaan Memberatkan	27

D. Teori Pemidanaan	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Data.....	43
C. Teknik Penelitian.....	44
D. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan No. 846/Pid.B/2011/PN.Mks	46
1. Duduk Perkara	46
2. Analisis Hukum	46
B. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan No. 1357/Pid.B/2014/PN.Mks	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum diartikan sebagai “Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau oleh pemerintah”. Merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Hampir setiap hari kita dapat melihat di media elektronik maupun media massa, perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada

tindak pidana pencurian.

Jenis kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di kota Makassar, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diajukan ke Pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kejahatan pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem keamanan lingkungan, serta adanya kesadaran dari setiap individu dalam masyarakat untuk lebih waspada dalam menjaga harta benda miliknya, maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian.

Kejahatan pencurian termuat dalam Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan

keluarga (Pasal 367 KUHP).

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Wirjono (Hermin Hadiati, 1984:25) menerjemahkan dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang digunakan oleh R. Soesilo (1991:46) yaitu "pencurian dengan pemberatan" sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Menurut M. Sudradjat Bassar (1986:70), tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi. Pencurian pada waktu malam, unsur 'waktu malam' ini memang bernada memberikan sifat lebih jahat pada pencurian. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.

Pengertian 'bekerja sama' adalah apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga, mengawasi, kalau-kalau perbuatan mereka diketahui orang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. (Studi Kasus Nomor : 1357/pid B/2014/PN.MKS)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor:1357/pid B/2014/PN.MKS.
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor: 1357/pid B/2014/PN.MKS

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor: 1357/pid B/2014/PN.MKS.
2. Guna mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada putusan Nomor: 1357/pid B/2014/PN.MKS.

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian berat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencurian berat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid (1987:33), menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:59) bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa "Beianda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya

sampai kepada yang setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos (A. Zainal Abidin Farid, 1987:33) yaitu:

- 1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- 2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- 3) Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan

kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).

4) Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, (R. Soesilo, 1991:26-28) menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas:

1) Unsur obyektif yang meliputi:

- a) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya.
- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian..
- c) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu

perbuatan mengambil itu dilakukan".

- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

- 2) Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya peanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana.

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan eiemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe (Bambang Poernomo, 1982:98) yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu:

- a Ada unsur melawan hukum;
- b Unsur kesalahan; dan
- c Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut (Adami Chazawi, 2002:121):

- a Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan peanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana

pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

- e Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;g
- g Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepn'viligeerde delicten*); dan
- j Berdasarkan kepentingan hukum yang diiindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diiindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, (P.A.F. Lamintang, 1984:184) sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 1988:104) menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat; dan
3. keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

1. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
2. kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menurut Tongat (2002:3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:
 - a Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362

KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

- b Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
- c Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dadei*) yang berupa:

- a Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b Kesalahan (*schuld*)

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
- 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*)

dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk (Rusli Effendy, 1989:80), yaitu:

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan
Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wetens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:
 - a Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
 - b Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
 - c Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.
2. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan
Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut (Rusli Effendy, 1989:26) menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:13) mengemukakan bahwa:

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung, 2005:25) mengemukakan bahwa kealpaan adalah:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk

pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut (P.A.F. Lamintang, 1989:1):

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Perumusan pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan sebagai berikut (Moeljatno, 1987:128):

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1) Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur:

a) mengambil;

- b) suatu barang; dan
- c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2) Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur:

- a) dengan maksud;
- b) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
dan
- c) secara melawan hukum.

b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah "pencurian dengan pemberatan" biasanya secara doktrinal disebut sebagai "pencurian yang dikualifikasikan". Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan

pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5

KUHP).

c) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan (Moeljatno, 1987:129):

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam

palsu;

- 4) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
 - 5) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
 - 6) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
- 7) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah "pencurian dengan kekerasan" atau populer dengan istilah "curas". Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut (Moeljatno, 1987:130):

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;
 - ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

(5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya. Moeljatno (1987:130) mengemukakan bahwa:

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami-isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian menurut P.A.F.

Lamintang (1984:1) yaitu:

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas itu terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif:

a. Unsur subyektif

"met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen"

atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

b. Unsur obyektif

- 1) "hij" atau barangsiapa;
- 2) "wegnemen" atau mengambil;
- 3) "eeniggoed" atau sesuatu benda; dan
- 4) "dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort" atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

P.A.F. Lamintang (1984:8) menambahkan:

Unsur-unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Seperti telah diketahui "unsur obyektif pertama" dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah "*hij*", yang lazim diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata "barangsiapa". Kata "*hij*" tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya seribu rupiah.

Sedangkan Hermin Hadiati (1984:20), mengemukakan:

"Unsur obyektif yang kedua" dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 'mengambil' dari tempat di mana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata "mengambil" sudah tersimpul pengertian "sengaja" maka undang-undang tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil". Kalau kita mendengar kata "mengambil" maka pertama terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Perbuatan "mengambil" tidak cukup apabila si pelaku hanya memegang barangnya saja, akan tetapi si pelaku harus melakukan suatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh di dalam kekuasaannya.

Kaitannya dengan unsur "mengambil", Moch. Anwar (1986:12)

mengemukakan pendapatnya tentang 'mengambil' dari tindak pidana pencurian sebagai berikut:

Unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran se suai dengan perkembangan masyarakat. "Mengambil" pada mulanya diartikan

memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan "mengambil" berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu beradadi luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik.

Mengenai pengertian unsur "mengambil" yang diberikan oleh P.A.F. Lamintang (1989:12), sebagai berikut:

Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan "mengambil", sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata "mengambil" itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- a mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
- b mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sehingga dapat dimengerti jika di dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata "mengambil" tersebut.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan "mengambil" diantaranya adalah Simons, pengertiannya adalah sebagai berikut (P.A.F. Lamintang, 1989:13):

Mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu peiaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu "tindak pidana formil", maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah seiesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah peiaku tersebut melakukan perbuatan

"mengambil" seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Selanjutnya mengenai unsur obyektif ketiga, P.A.F. Lamintang (1989:16-17) menjelaskan bahwa:

"Unsur obyektif ketiga" dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu ialah *"eenig goed"* atau "suatu benda". Kata *"goed"* atau 'benda' itu oleh para pembentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai di dalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan-rumusan dari lain-lain tindak pidana, seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada waktu Pasal 362 KUHP tertentu, orang hanya bermaksud untuk mengartikan kata *"goed"* yang terdapat di dalam rumusannya, semata-mata sebagai *"stoffelijk en reorend goed"* atau sebagai 'sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan'.

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terhadap pengertian tersebut, Moch. Anwar (1986:18) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *"res nullius"* dan *res derelictae*.

Menurut R. Soesio (1984:118) yang dimaksud dengan "barang" adalah:

segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan sebagainya.

Berkenaan dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Simons (PAF. Lamintang, 1989: 21) mengatakan bahwa "Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian". Dari kata-kata "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan" di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.

Moch. Anwar (1986:19) menjejaskan pengertian "dengan maksud melawan hukum":

istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku Harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

Lebih lanjut mengenai pengertian "memiliki barang bagi diri sendiri" Moch. Anwar (1986:19) berpendapat sebagai berikut:

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya,

dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Sejalan dengan pendapat di atas, R. Soesilo (1984:119) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pengambilan Harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu.

Kata-kata "memiliki secara melawan hukum" itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut "*zich toe-eigenen*", karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah "cara" untuk dapat memiliki suatu barang. (P.A.F. Lamintang, 1989:31).

C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan

1. Pengertian terhadap "Dalam Keadaan Memberatkan"

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari

pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP (Prodjodikoro Wirjono, 2008:19). Hal ini diatur dalam Pasal 363:

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapai terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; dan
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Unsur-unsur dengan pemberatan

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah:

1. Pencurian Ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur "ternak". Apakah yang dimaksud dengan "ternak"? Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, "ternak" diartikan "hewan berkuku satu", hewan pemamah biak dan babi". Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya

Unsur "ternak" menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapai terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).

Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang

karena ada bencana tidak terjaga oleh pemilikinya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

- i. Unsur "malam"

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan "malam" ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- ii. Unsur "dalam sebuah rumah"

Istilah "rumah" diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian "rumah" adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.

- iii. Unsur "pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang

nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya

Mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.

iv. Unsur "dua orang atau lebih"

v. Unsur "bekerja sama"

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam

melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dan suatu peti rusak.

Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak "kunci palsu" diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.

D. Teori Pidanaan

Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *strafft*, yang biasa diartikan sebagai hal yang dipidanakan atau ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala

macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana itu sendiri. Pidana di pandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984:21), "Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".

Selanjutnya Adami Chazawi (2002:23) menyatakan bahwa:

Pidana adalah lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbarkeit*). Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Pada saat ini oleh masyarakat umum telah diterima pendapat bahwa negaralah yang berhak memidana dengan perantaraan aparat hukum pemerintahan. Oleh karena negara mempunyai kekuasaan, maka pidana yang dijatuhkan hanyalah suatu alat untuk mempertahankan tata tertib negara. Negara Harus mengembalikan ketentraman apabila ketentraman itu terganggu dan Harus mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Hans Kelsen (2006:78), bahwa:

Sanksi itu diancamkan terhadap seorang individu yang perbuatannya dianggap oleh pembuat undang-undang membahayakan masyarakat, dan oleh sebab itu pembuat undang-undang bermaksud untuk mencegahnya dengan sanksi tersebut.

Pada zaman Yunani dahulu oleh Plato, mengemukakan bahwa

"tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, tetapi menakut-nakuti dan memperbaiki orang ' serta tercapainya keamanan". Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa tujuan pidana adalah "menakut-nakuti serta memperbaiki orang", Pada abad pertengahan Thomas Aquino, sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah "bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan". (Rusli Effendy, 1986:108).

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal sudah membuat formulasi yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah. (Dwidja Priyanto, 2006:23). Begitu pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah "untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang". Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan bahwa "pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral". (Dwidja Priyanto, 2006:24).

Sebagaimana tujuan pemidanaan tersebut di atas, di dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3 (tiga) R (*Reformation, Restraint, dan Retribution*) dan 1 (satu) D (*Deterrence dan general deterrence*).

Andi Hamzah (1994:28) menyatakan bahwa:

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi itu perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

Sementara H.R. Abdussalam (2006:22) menyatakan bahwa:

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana.

Untuk tujuan pidana *restraint*, Andi Hamzah (1994:29) menyatakan bahwa "*Restraint* adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman",

Pada tujuan pemidanaan *retribution*, Andi Hamzah (1994:33) menyatakan bahwa "*Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan".

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan *retributif*, H.R. Abdussalam (2006:21) mengemukakan bahwa:

Rethbutif tidak lain ialah penebusan dosa, penebusan dosa bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan

masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepantasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penggantian kerugian merefleksikan kehendak atau keinginan masyarakat akan balas dendam.

Dalam tujuan pemidanaan *deterrence*, Andi Hamzah (1994:34)

menyatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Sedangkan Michael J. Allen (H.R. Abdussalam, 2006:23)

menyatakan bahwa:

Deterrence terdiri dari *particular deterrence* dan *general deterrence*. *Particular deterrence*, mencegah pelaku tindak pidana kembali di masa mendatang ataupun *general deterrence* yakni mencegah para pelaku tindak pidana lain yang mungkin untuk melakukan tindak pidana melalui contoh yang di buat dari masing-masing pelaku tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan dengan tujuan pidana yang garis besarnya disebut di atas, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut. Terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuan pidana, yaitu:

- a Teori absolut atau teori pembalasan (*retributif / vergeldings theorien*);
- b Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*); dan
- c Teori gabungan (*vehnigings theorien*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu

sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk menjatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat untuk menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itulah teori ini disebut teori absolut, Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat dari suatu pidana adalah pembalasan semata.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif (1984:10) pada teori ini, "pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan".

Selanjutnya Adami Chazawi (2002:53) memaparkan bahwa:

Dasar pijakan dari teori adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Alasan negara sehingga mempunyai hak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, dan tidak memperhatikan dampak yang terjadi kepada penjahat itu ataupun masyarakat dalam penjatuhan pidana itu. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Di dalam buku E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002:59-60), teori pembalasan ini terbagi atas 5 (lima), yaitu sebagai berikut:

1. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moraal filosofie)*.
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.
2. Pembalasan "bersambut" (*dialektis*).
Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.
3. Pembalasan demi "keindahan" atau kepuasan (*aesthetisch*).
Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
4. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (Agama).
Teori ini dikemukakan, oleh Dthal, (termasuk juga Gewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya keadilan Tuhan.
5. Pembalasan sebagai kehendak manusia.
Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat. Penganut teori ini antara lain adalah Jean Jacques Roesseau, Grotius, Beccaria dan lain sebagainya.

Teori tentang tujuan pidana yang kedua adalah teori relatif. Teori mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk menghindari terjadinya kejahatan. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan

tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (1984:17), menyatakan bahwa:

Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Menurut J. Andenas, "teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*)". Sedangkan Nigel Walker mengatakan bahwa "teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive foint of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah* untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (penganut teori reduktif)". (Dwidja Priyanto, 2006:24).

Adami Chazawi (2002:157-158) mengemukakan bahwa:

Teori relatif atau tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk mengakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Selanjutnya menurut teori ini tujuan pidana adalah mengamankan masyarakat dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam menjaga serta mempertahankan tata tertib

masyarakat ini, maka pidana itu adalah bertujuan untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menghindarkan pelanggaran norma-norma hukum ini, pidana itu dapat bersifat menakuti, memperbaiki dan dapat juga bersifat membinasakan.

Sehubungan dengan sifat pidana tersebut, Leden Marpaung (2005:4) memaparkan sebagai berikut:

- a. Menjerakan.
Dengan penjatuhan pidana, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generate preventive*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana.
Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani pidana, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi menurut teori relatif pidana ini sebenarnya bersifat menghindarkan (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pidana terbagi atas dua bagian yakni prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus berkaitan dengan maksud dan tujuan

pidana ditinjau dari segi individu, karena prevensi khusus ini bermaksud juga supaya si tersalah sendiri jangan lagi melanggar.

Menurut prevensi khusus tujuan pidana tidak lain ialah bermaksud

menahan niat buruk pembuat, yang didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan supaya orang yang bersaiah itu tidak berbuat kesalahan lagi.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Van Hammel dari Belanda (H.R. Abdussalam, 2006:31) bahwa:

Tujuan pemidanaan, selain untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk melakukan (*ofschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onskchadelijkmaking*).

Tujuan pemidanaan memperbaiki si penjahat, agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan seiaema menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan keahlian seperti menjahit, bertukang dan lain sebagainya, sebagai bekal setelah seiesai menjalani pemidanaan. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada 3 (tiga) macam yaitu perbaikan, intelektual, dan perbaikan moral serta perbaikan yuridis.

Prevensi umum bertujuan untuk mencegah orang pada umumnya jangan melanggar karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum pada kaum penjahat, maka penjahat yang tertangkap Harus dipidana berat supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana.

Dalam teori prevensi umum ini, tujuan pokok yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua

orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. H.B. Vos (H.R. Abdussalam, 2006:32) menyatakan bahwa "Teori prevensi umum bentuknya berwujud pembedaan yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan".

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka lahir aliran ketiga yang didasarkan pada jalan pemikiran bahwa pembedaan hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Menurut Grotius (H.R. Abdussalam, 2006:49), menyatakan bahwa:

Teori gabungan ini sebagai pembedaan berdasarkan keadilan absolut, "*de absolute gerechtigheid*" yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat dan dikenal dengan bahasa latin "*puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*", artinya tidak seorangpun yang dipidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau tidak lebih dari kefaedahan.

Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pemabaiasan dan teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat, dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Ada yang mengutamakan tujuan membalas, agar kejahatan itu dibaias dengan pidana yang lebih berat daripada melindungi masyarakat.

Yang lain berpendapat bahwa tujuan pidana yang pertama ialah melindungi masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu tidak boleh dijatuhkan pidana lebih berat daripada membalas kesalahan pembuat atau kesengsaraan yang diadakan olehnya.

Sementara Van Apeldorn (Rusli Effendy, 1986:116) menyatakan bahwa:

Teori gabungan ini tepat benar karena mengajarkan bahwa pidana diberikan baik *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) maupun *nepeccatur* (supaya orang jangan membuat kejahatan).

Dan akhirnya dikatakan bahwa asas pembalasan yang kuno tidak beriak lagi, malah diantara mereka yang masih menganggapnya penting, ada kesediaan untuk memperhatikan aspek-aspek *social defence* dari pidana.

Untuk membandingkan dengan teori-teori tentang tujuan pembedaan seperti yang dikemukakan di atas, maka dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1982 dapat dijumpai gagasan tentang maksud tujuan pembedaan dalam rumusan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah diadakannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai pada masyarakat; dan
4. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia melainkan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain pendapat di atas, Ted Honderich juga mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pidanaan (Amir Ilyas, 2012:106).

Menurutnya pidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur yakni:

1. Pidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaan. Unsur pertama ini pada dasarnya merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain. Secara actual, tindakan subjek lain itu dianggap salah bukan saja karena mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, tetapi juga karena melawan hukum yang berlaku secara sah.
2. Setiap pidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi pidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang hukum kolektif, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri Makassar yang berada di kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi penelitian di kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan sentral pengadilan yang berada di Sulawesi Selatan. Di samping itu, kota Makassar merupakan domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, sekaligus merupakan kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan No. 1357/Pid.B/2014/PN.Mks

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No. 1357/ Pid. B/ 2014/ PN. Mks, menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 1357/ Pid. B/ 2014/ PN. Mks, sebagai berikut:

Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 juli 2013 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Jalan Monginsidi lama No. 5 tepatnya dalam toko Cirkle'K. Terdakwa O P I dan temannya masuk dan mengambil barang berupa Brangkas dan beberapa barang lainnya berupa rokok.

2. Analisis Hukum

Hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau subtansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak

atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. Terkait dengan hal itu, Simons menyatakan bahwa:

Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian-urain delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarfeit*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.

Selain itu, penjelasan mengenai hukum pidana materil juga dapat dijumpai dalam definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang mengatakan bahwa:

Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

Dari dua pendapat ahli di atas, baik simons maupun moeljatno berpandangan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Dalam putusan perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana.

Adapun rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana adalah sebagai berikut:

Ayat (1) : diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
3. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dikemukakan oleh A. Karim Nasution (Hamzah, 1987:17) memberikan pengertian tentang surat dakwaan sebagai berikut:

Tuduhan adalah suatu surat akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan.

Terkait dengan masalah surat dakwaan, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal, yang dimaksud dengan dakwaan tunggal adalah surat dakwaan disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan tindak pidana hanya satu perbuatan saja, penyusunan dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan penyusunan surat dakwaan lainnya,

karena Penuntut Umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja.

Mendasarkan pada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
- c. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- d. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa O P I berdasarkan fakta dipersidangan dan menurut keterangan saksi-saksi serta terdakwa sendiri membenarkan bahwa benar terdakwa yang bernama O P I dengan identitas lengkap berdasar

surat dakwaan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Ad.2. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 juli 2013, sekitar jam 05.00 wita, bertempat di jalan monginsidi lama No. 5 Makassar tepatnya dalam toko circle'k dimana toko tersebut dalam keadaan tertutup yang dirantai atau terkunci terdakwa masuk tanpa sepengetahuan dan tanpa dikehendaki oleh pemilik circle'k terdakwa mengambil barang milik toko tersebut berupa 1 (satu) buah brangkas yang berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- dan beberapa slok rokok.

Ad.3. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa haru jum'at tanggal 26 juli 2013, sekitar jam 05.00 wita, bertempat di jalan mongisidi lama No. 5 Makassar tepatnya dalam toko Cirkle'K berupa 1 (satu) buah brangkas yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- dan beberapa slok rokok.

A.d.4. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 juli 2013, sekitar pukul 05.00 wita bertempat di jalan monginsidi lama No.5 Makassar tepatnya dalam toko Circle'K terdakwa bersama Lk. Budi dan Lk. Akbar mengambil barang milik toko Circle'K berupa 1 (buah) brangkas yang berisi uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- dan beberapa slok rokok. Dengan cara terlebih dahulu merusak rantai yang terpasang pada pintu dengan menggunakan tang.

B. Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian berat dalam putusan No. 1357/Pid.B/2014/PN.Mks

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut sebagai pembedaan. Berkaitan dengan masalah pembedaan, menurut (Sudarto, 1989:79):

Ada beberapa hal pokok yang mempengaruhi kualitas penetapan pidana yang dijatuhkan. Sehingga dalam penetapan pidana, Sudarto menganjurkan kepada hakim agar "pertama-tama harus dipahami benar oleh hakim" apa makna kejahatan, penjahat (pembuat) dan pidana". Tidaklah cukup untuk mengatakan, bahwa pidana itu harus setimpal dengan berat dan sifat kejahatan.

Sebelum menjatuhkan putusannya Hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang merumuskan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan pidana pada putusan perkara No: 1357/Pid.B/2014.PN.Mks, adalah:

- a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.
- b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pada putusan perkara No: 1357/Pid.B/2014/PN.Mks, yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ini, sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) KUHP merumuskan ada 5 (lima) alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP dirumuskan

bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara No. 1357/Pid.B/2014/PN.Mks, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum guna memberikan keterangannya di sidang pengadilan, saksi-saksi dimaksud adalah:

- a. Saksi Hartono Slamet;
- b. Saksi Fajar; dan
- c. Saksi Natalia.

Dari semua keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya. Pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah diajukannya barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, dalam perkara ini barang bukti dimaksud yaitu berupa:

- a. 1 (satu) Buah Brankas; dan
- b. Beberapa barang berupa rokok.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP dirumuskan tentang pengertian keterangan terdakwa, yaitu: "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa

nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian apabila dihubungkan dengan kasus yang penulis teliti yaitu putusan perkara No.1357Pid.B/2014/PN.Mks, dapat dikemukakan bahwa keterangan terdakwa itu sama dengan arti pengakuan dari terdakwa. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam perkara ini adalah Opi.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal pemeriksaan keterangan saksi dan adanya alat bukti, serta keterangan terdakwa, maka pertimbangan hukum Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya secara sah dan menyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu sudah sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi pidana.

Menurut Sudarto (1990:48):

Dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang, artinya perbuatan konkrit dari pembuat harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang dan perbuatan harus masuk dalam delik itu.

Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting sebagai prinsip

kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam perkara perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.

Dalam putusan perkara No: 1357/Pid.B/2014/PN.Mks, majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasannya bahwa perbuatan atau tindakan pencurian dan mengambil barang berupa: 1 buah brankas dan beberapa barang berupa rokok, yang jadi bukti di persidangan, barang tersebut sama sekali bukan milik sendiri melainkan milik orang lain, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, terdakwa menyesali perbuatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan perkara No: 1357/Pid,B/2014/PN.Mks, juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, maka Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi dasar amar putusannya.

Pada hakekatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh Undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa. Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang

pada intinya kebebasan Hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh Undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka Hakim mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana serta ketentuan hukum lain yang berkenaan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa O P I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bragkas yang berisi uang Rp. 4.000.000 beserta barang-barang lainnya dikembalikan kepada korban.
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .2000,- (dua ribu rupiah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam putusan perkara No: 1357/Pid.B/2014/PN.Mks. Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
 - c. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP , sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No: 1357/Pid.B/2014/PN.Mks. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan pada perkara, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya, yaitu:
 - a. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
 - b. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim, dan sebagai dasar dalam memutus perkara terhadap terdakwa.
 - c. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

B. Saran

Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujukan bagi diri si pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan diharapkan berdampak pada masyarakat pada umumnya, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim diharapkan memperhatikan tujuan pemidanaan, sehingga masyarakat akan menyadari dan tahu bahwa melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah. 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Zainai Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwidja Priyanto. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- H.R. Abdussalam. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat)*. Jakarta: Restu Agung.
- Hans Kelsen. 2006. *General Theory of Law and State (Teori Umum tentang Hukum dan Negara)*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Hermin Hadiati. 1984. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahan*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Jilid I)*. Bandung, Alumni.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1989. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama. Bandung: Sinar Baru.
- R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Bogor: Politea.
- _____. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarnya Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI)
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.